

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MELALUI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS)

I Putu Widyanto

Pascasarjana – IAHN-TP Palangka Raya

[putuwidyanto@gmail.com](mailto:putuwidyanto@gmail.com)

### Riwayat Jurnal

Artikel diterima:

Artikel direvisi:

Artikel disetujui:

### ABSTRAK

Meningkatkan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan penguatan partisipasi masyarakat, dengan ikut serta dalam penyusunan program serta implementasinya dalam proses pembelajaran. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan dapat dilakukan bila sekolah memiliki otonomi untuk penyelenggaraan pendidikannya dengan melibatkan semua warga sekolah termasuk masyarakat dan orang tua. Penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) diyakini sebagai suatu model implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan yang mencirikan otonomi kepada sekolah dalam pengelolaannya. MBS merupakan salah satu langkah dalam mendukung peningkatan mutu sekolah. MBS menekankan pada seluruh pihak yang berkepentingan dalam peningkatan mutu pendidikan dalam menggodok dan merumuskan segala macam keputusan yang berkaitan dengan pendidikan serta ikut serta dalam implementasi konsep yang telah dibuat. Partisipasi dari orangtua siswa dan masyarakat dalam program MBS berupa merealisasi program sekolah selain itu mendukung sekolah melalui bantuan dana dan bersama warga sekolah merumuskan dan mengembangkan program yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan disekolah. Partisipasi masyarakat dan orang tua siswa dapat membantu sekolah sebagai narasumber atau organisator kegiatan sekolah. Selain itu dapat juga terlibat secara aktif dalam proses kontrol kualitas pengelolaan sekolah.

Kata Kunci : manajemen berbasis sekolah, partisipasi masyarakat

### Pendahuluan

Perkembangan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam (SDA) yang dimilikinya tapi jauh lebih penting adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) yang di miliki negara tersebut, dengan SDM yang berkualitas suatu negara

dapat bersaing bahkan lebih maju dari negara lain yang memiliki SDA yang berlimpah. Menurut Tilaar (2003:297) peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan dengan pendidikan yang berkualitas. Kualitas sebuah bangsa dapat menjadi baik jika ditunjang dengan sistem pendidikan yang baik. Dengan sistem pendidikan yang baik, memungkinkan masyarakatnya berpikir kritis, kreatif dan produktif, karena keberhasilan suatu bangsa dalam membangun pendidikan menjadi barometer tingkat kemajuan suatu negara (Kuncoro dalam Riduwan, 2013:18).

Pendidikan merupakan hal yang penting untuk menjamin perkembangan suatu bangsa. Menurut Machwe (2000:165) pendidikan bertujuan membangun manusia seutuhnya baik fisik maupun karakternya. Melalui pendidikan, masyarakat suatu bangsa menjadi individu yang mempunyai karakter dan keterampilan untuk secara mandiri meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan peranan sebagai pribadi dan warga negara dalam perkembangan kemajuan suatu bangsa.

Menurut Dewey dalam Faturrahman dkk (2012: 4) Pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental baik menyangkut daya pikir atau daya intelektual, maupun daya emosional atau perasaan yang diarahkan kepada tabiat manusia dan kepada sesamanya. Rohman (2009:10), menjelaskan pendidikan merupakan perwujudan aktivitas interaktif yang sadar dan terencana dilakukan oleh minimal dua orang, satu pihak berperan sebagai fasilitator dan dinamisator sedangkan pihak lainnya sebagai subyek yang berupaya mengembangkan diri. Proses ini dicapai melalui penciptaan pendidikan yang bermutu dimana suasana pembelajaran dan puncak keberhasilan adalah kedewasaan baik secara fisik, psikologis, sosial, emosional, ekonomi, moral dan spiritual pada peserta didik.

Pengembangan pendidikan di Indonesia diharapkan terjadi pada semua tingkatan pendidikan, baik dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Pengembangan pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan bangsa Indonesia. Berbagai kebijakan yang terkait

dengan pendidikan telah dilakukan pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia, kebijakan yang dilakukan mencakup banyak aspek seperti pengembangan kurikulum, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana penunjang pendidikan serta pengembangan pengelolaan organisasi pendidikan. Pengembangan pendidikan di Indonesia sekurang-kurangnya menggunakan empat strategi dasar. Pertama pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan; kedua relevansi; ketiga peningkatan kualitas dan keempat efisiensi. Secara umum strategi tersebut dapat dibagi menjadi dua dimensi yakni penjaminan mutu dan pemerataan pendidikan. (Amri, 2013:68).

Sistem penjaminan mutu pada sekolah merupakan proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal dan eksternal memperoleh kepuasan atas kinerja dan lulusan (Suarni, 2012:13) Masih menurut Suarni (2012:13) tujuan penjaminan mutu adalah terjaminnya mutu penyelenggaraan pendidikan baik pada masukan, proses, maupun keluaran berdasarkan peraturan perundang undangan, nilai dasar, visi, dan misi penyelenggara pendidikan.

Agar penjaminan mutu pendidikan tinggi di sekolah dapat dilaksanakan, maka terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar pelaksanaan penjaminan mutu tersebut dapat mencapai tujuannya, yaitu komitmen, perubahan paradigma, dan sikap mental para pelaku proses pendidikan, serta pengorganisasian penjaminan mutu di sekolah. (Tim Penyusun, 2003:17). Kerjasama antara para pelaku proses satuan pendidikan seperti guru, kepala sekolah, masyarakat, dan orang tua siswa untuk membangun komitmen, perubahan paradigma, dan sikap mental bersama diperlukan untuk dapat membangun pendidikan disekolah agar menjadi pendidikan yang bermutu.

Mutu dalam sebuah pendidikan merupakan sebuah keharusan bagi penyelenggara pendidikan (sekolah) dalam menjaga kepercayaan masyarakat, maka

persoalan seharusnya bukan lagi melihat sistem penjaminan mutu pendidikan itu sebagai sebuah kebijakan, akan tetapi semestinya telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tugas dan tanggung jawab moral sekolah (Muhammad S, 2014: 56). Dengan melaksanakan penjaminan mutu secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan sekolah dapat meningkatkan kinerjanya dengan maksimum, sehingga dapat mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan global yang akan dihadapi nantinya.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan disekolah antara lain melalui berbagai kegiatan pelatihan guru, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, sertifikasi guru. Namun realisasi peningkatan mutu pendidikan masih belum merata disetiap daerah di Indonesia. Dari berbagai analisis, Dirjen Pendidikan Dasar Menengah menyebutkan sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan disekolah tidak mengalami peningkatan secara merata :

Pertama kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional yang menggunakan pendekatan *education production function* (Susilawaty, dkk, 2012:35). Artinya terlalu menekankan pada input & output pendidikan dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Faktor kedua adalah penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara biokratik-sentralistik, sehingga menempatkan sekolah sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang ditentukan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat (Susilawaty, dkk, 2012:35). Faktor ketiga adalah peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim, partisipasi masyarakat selama ini lebih banyak bersifat dukungan dana, bukan pada proses pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas (Susilawaty, dkk, 2012:35).

Salah satu upaya nyata untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan penguatan partisipasi masyarakat, hal tersebut bermakna bahwa selain masyarakat

mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, juga melekat kewajiban untuk ikut serta mengadakannya baik dalam menyediakan dana untuk pengadaan, pengembangan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan maupun kepakaran atau keahlian yang diperlukan dalam penyusunan program serta implementasinya dalam proses pembelajaran (Budimansyah, 2008:57). Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan dapat dilakukan bila sekolah memiliki otonomi untuk penyelenggaraan pendidikannya dengan melibatkan semua warga sekolah termasuk masyarakat dan orang tua.

Penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) diyakini sebagai suatu model implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan yang mencirikan otonomi kepada sekolah dalam pengelolaannya. MBS merupakan salah satu langkah dalam mendukung peningkatan mutu sekolah. MBS menekankan pada seluruh pihak yang berkepentingan dalam peningkatan mutu pendidikan dalam menggodok dan merumuskan segala macam keputusan yang berkaitan dengan pendidikan serta ikut serta dalam implementasi konsep yang telah dibuat (Assidiq, dkk.2014: 3).

Menurut Satori dalam Susilawaty, dkk, (2012:36). ada 16 indikator keberhasilan implementasi MBS di sekolah yaitu; (1) efektifitas proses pembelajaran, (2) kepemimpinan sekolah yang kuat, (3) pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, (4) sekolah memenuhi budaya mutu, (5) sekolah memiliki "Team Work" yang kompak, cerdas dan dinamis, (6) sekolah memiliki kemandirian, (7) partisipasi warga sekolah dan masyarakat, (8) sekolah transparansi, (9) sekolah memiliki kemauan untuk berubah, (10) sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan, (11) sekolah responsif dan antisipasif terhadap kebutuhan, (12) sekolah akuntabilitas, (13) sekolah memiliki sustainabilitas, (14) output adalah prestasi sekolah, (15) penekanan angka *drop out*, (16) keputusan staf.

Dari 16 indikator tersebut kemandirian sekolah dan partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dari pelaksanaan MBS karena dalam mengelola bidang kurikulum dan pengajaran, bidang kesiswaan, bidang tenaga kependidikan, bidang

keuangan, serta bidang sarana dan prasarana membutuhkan kemandirian serta partisipasi masyarakat agar pelaksanaan MBS berjalan baik.

Berjalannya pendidikan disekolah tidak dapat dilepaskan dari masalah biaya. Oleh karena itu, pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun orang tua siswa untuk menghasilkan pendidikan bermutu harus dipandang sebagai usaha bersama bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Dengan adanya kesadaran dalam berpartisipasi dari masyarakat dan orang tua ikut serta dalam pembiayaan pendidikan disekolah dapat menjadikan solusi pembiayaan pendidikan ditingkat sekolah sehingga kekurangan pembiayaan yang berasal dari pemerintah dapat dipenuhi oleh masyarakat dan orang tua dengan tujuan akhir meningkatkan mutu pendidikan disekolah.

Mengacu kepada konsep di atas, masalah partisipasi masyarakat dan orang tua siswa dalam perkembangan pendidikan melalui pelaksanaan MBS menjadi sangat strategis untuk dikaji. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut penulis merasa untuk mengadakan penelitian dengan judul “Partisipasi masyarakat dalam perkembangan pendidikan melalui MBS ”

## **Pembahasan**

### **Konsep Manajemen Berbasis Sekolah**

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan model manajemen yang memberikan otonomi dan fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah, mendorong partisipasi langsung warga sekolah baik guru, siswa, kepala sekolah dan karyawan, masyarakat dan orang tua siswa dalam pengelolaan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan disekolah (Assidiq, 2014:4). Manajemen berbasis sekolah diprioritaskan pada 3 pilar yaitu manajemen, PAKEM (pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan) dan peran serta masyarakat.

Salah satu partisipasi masyarakat dan orang tua siswa dalam pengelolaan MBS dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2.1. sistem pelaksanaan MBS

Pengelolaan dimaknai dari dua sudut pandang yakni proses dan komponen manajemen sekolah. Sebagai proses, manajemen sekolah berbentuk sistem yang komponennya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Ditinjau dari komponennya, manajemen sekolah meliputi : (1) kurikulum dan pembelajaran, (2) peserta didik, (3) pendidik dan tenaga kependidikan, (4) pembiayaan, (5) sarana dan prasarana, (6) hubungan sekolah dan masyarakat, dan (7) budaya dan lingkungan sekolah (Kemendikbut, 2013:10).

Konsep MBS mengacu pada teori *effective school* yang lebih memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan. Beberapa indikator yang menunjukkan karakter dari konsep MBS antara lain lingkungan sekolah yang aman dan tertib, sekolah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai, sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat, adanya harapan yang tinggi dari personel sekolah untuk berprestasi (Hamzah, 2013:153).

Manajemen berbasis sekolah merupakan suatu perubahan paradigma dalam pengelolaan pendidikan di sekolah. Pelaksanaan MBS memberikan otonomi kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk mengajak masyarakat dan orang tua siswa

untuk berpartisipasi, sehingga diharapkan muncul tanggung jawab terhadap pendidikan yang diselenggarakan di sekolah (Budimansyah, 2008:59). Dengan otonomi, sekolah mempunyai kewenangan yang lebih besar untuk mengembangkan dan mengelola sekolah menjadi lebih mandiri, Dengan kemandirian, sekolah akan lebih termotivasi untuk mengembangkan pendidikan disekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah yang didasarkan atas potensi sekolah dan sumber daya yang dimilikinya.

Peran pemerintah dalam pelaksanaan MBS adalah memberikan fasilitas dan bantuan pada saat sekolah dan masyarakat menemui kesulitan dalam pemecahan masalah. Fasilitasi ini mungkin berbentuk *capacity building*, bantuan teknis pembelajaran atau manajemen sekolah, subsidi bantuan sumberdaya pendidikan, serta kurikulum nasional dan pengendalian mutu pendidikan baik tingkatan daerah maupun nasional (Budimansyah, 2008:59).

Pelaksanaan MBS memiliki beberapa tujuan antara lain : a) meningkatkan mutu pendidikan melalui pemberian otonomi kepada sekolah untuk mengelola dan memberdayakan sumber daya yang ada secara mandiri, b) meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab warga sekolah, masyarakat dan orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan melalui keputusan bersama, c) meningkatkan kompetisi yang sehat antara sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan yang diharapkan (Sukmawati, 2011:107).

Sedangkan prinsip dari pelaksanaan MBS berasal dari UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 48 Ayat (1) menyatakan bahwa, "Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik". Sejalan dengan amanat tersebut, PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 49 Ayat (1) menyatakan: "Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan

akuntabilitas". Berdasarkan kedua isi kebijakan tersebut, prinsip MBS meliputi: (1) kemandirian, (2) keadilan, 3) keterbukaan, (4) kemitraan, (5) partisipatif, (6) efisiensi, dan (7) akuntabilitas. (Kemendikbut, 2013:12-13).

Selain itu pelaksanaan MBS akan berjalan baik bila didukung oleh beberapa faktor Pendukung antara lain :

1. Kepemimpinan dan manajemen sekolah yang baik

MBS akan berhasil jika ditopang oleh kemampuan profesional kepala sekolah dalam memimpin dan mengelola sekolah secara efektif dan efisien, serta mampu menciptakan iklim organisasi yang kondusif untuk proses belajar mengajar.

2. Kondisi sosial, ekonomi dan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan

Faktor eksternal yang akan turut menentukan keberhasilan MBS adalah kondisi tingkat pendidikan orangtua siswa dan masyarakat, kemampuan dalam membiayai pendidikan, serta tingkat apresiasi dalam mendorong anak untuk terus belajar.

3. Dukungan pemerintah

Faktor ini sangat membantu efektifitas implementasi MBS terutama bagi sekolah yang kemampuan orangtua/ masyarakatnya relative belum siap memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan. alokasi dana pemerintah dan pemberian kewenangan dalam pengelolaan sekolah menjadi penentu keberhasilan.

### **Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah**

Sebelum Pelaksanaan MBS masyarakat tidak dilibatkan bersama-sama dalam berbagai kegiatan sekolah. Program MBS mengajak semua pihak yang terlibat dalam sekolah dan menekankan perlu bekerja sama di sekolah dan di masyarakat. Tujuan digalakkan peran serta masyarakat adalah untuk mendorong masyarakat setempat supaya merasa "memiliki" sekolahnya dan lebih berperan dalam kegiatan sekolah. Peran serta di masa lalu pada umumnya hanya terbatas pada pemberian dana ke sekolah, tetapi lambat laun masyarakat lebih bertanggung jawab dalam membantu

perkembangan pendidikan di sekolah antara lain memperbaiki dan merawat gedung sekolah selain itu melalui paguyuban kelas mendampingi kegiatan di kelas secara langsung, dan orang tua dapat membantu guru di kelas.

Untuk mempermudah pengorganisasian masyarakat yang terlibat dibentuk komite sekolah. Komite sekolah dibentuk sebagai wadah atau organisasi nonprofit yang beranggotakan unsur orang tua peserta didik, pendidik, tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, kelompok DUDI, dan kelompok pemerhati pendidikan. Komite sekolah diharapkan menjadi partner sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Melalui program MBS peran komite sekolah dikembangkan sesuai tujuan pemerintah khususnya dalam hal:

- Bekerjasama dengan kepala sekolah dan guru untuk menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
- Mengumumkan rencana tersebut supaya diketahui masyarakat;
- Memantau sekolah dan memberi bantuan dalam hal: kondisi fisik sekolah, dan pelaksanaan kegiatan sekolah baik proses pembelajaran maupun kegiatan lainnya;
- Mendorong orang tua peserta didik dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- Mendorong kerjasama dengan masyarakat perorangan/organisasi/dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan
- Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Sedangkan Jenis-Jenis Peran Serta Masyarakat dalam pelaksanaan MBS antara lain:

1. Pendanaan Biaya Pendidikan

2. Pembangunan dan Perawatan Fisik Sekolah

Salah satu prioritas orang tua peserta didik dan masyarakat yang ikut terlibat dalam sekolah adalah peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Banyak orang tua yang telah ikut meningkatkan mutu bangunan dalam rangka program MBS.

3. Bantuan Nonfisik

a) Dorongan Peserta Didik untuk Belajar

Banyak sekolah yang bekerjasama dengan masyarakat untuk mendorong peserta didik belajar. Kegiatan tersebut termasuk:

- Mengidentifikasi anak yang putus sekolah serta mendorong dan membantu keluarga mereka supaya masuk sekolah;
- Menentukan jam wajib belajar pada malam hari untuk mendorong anak mengerjakan pekerjaan rumah dan membaca buku

b) Paguyuban Kelas

Orang tua dan pihak masyarakat lainnya juga dapat membantu pelaksanaan pendidikan secara langsung pada saat anak masuk sekolah.

Berbagai aktivitas lainnya dilakukan oleh paguyuban kelas seperti:

- Pengaturan ruangan beserta isinya
- Pemasangan gambar-gambar sebagai media pendidikan
- Pembuatan tempat pajangan dan rak buku perpustakaan kelas
- Penggantian papan tulis menjadi white board
- Pembuatan piket paguyuban di kelas
- Pembentukan portofolio sebagai dokumen hasil belajar anak.

## **Peran Serta Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan**

Perubahan kewenangan yang terjadi di era otonomi daerah dimana pengelolaan pendidikan berubah dari sistem sentralisasi ke desentralisasi. Desentralisasi pendidikan berarti terjadinya pelimpahan kekuasaan dan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan dibidang pendidikan (Halim, 2001: 15)

Hal pertama yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pengelola pendidikan adalah masalah pendanaan. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) memberi beban yang sangat berat bagi pemerintah daerah. Pasal 49 menyatakan sebagai berikut;

- (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Sebelum otonomi daerah, pembiayaan SD menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan SLTP dan SLTA menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dengan otonomi daerah, pola pembiayaan pendidikan mengalami perubahan

dimana daerah memiliki tanggung jawab untuk membiayai sektor pendidikan untuk semua jenjang. Daerah dengan APBD yang besar untuk memenuhi 20% anggaran untuk pendidikan tidak akan mengalami masalah, tetapi jika daerah tidak memiliki sumber dana yang cukup untuk mendanaikannya maka akan berdampak terjadinya penurunan kualitas pendidikan sebagai dampak otonomi daerah.

Pembiayaan pendidikan menurut UU No 32 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyatakan pembiayaan pendidikan diharapkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat tetap memberi bantuan melalui Dana alokasi Khusus pendidikan (DAKP), Bantu Operasional Sekolah (BOS), Block Grant (bentuk bantuan hibah atau bantuan sosial yang diberikan dari Kementerian Pendidikan kepada lembaga pendidikan/panitia pembangunan sekolah yang digunakan untuk pembangunan fisik sekolah/lembaga pendidikan, program PAUD dan Kebudayaan). Namun karena keterbatasan kemampuan pemerintah pusat dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan maka tanggung jawab pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua siswa.

Ikut sertanya masyarakat dan orang tua siswa dalam pembiayaan pendidikan tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003 bahwa tanggung jawab pendanaan pendidikan pada pasal 46 ayat (1) menyebutkan "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat".

Mundur kebelakang pada Pasal 6 Keputusan Mendiknas No 056/U/2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah menyebutkan, bahwa penyelenggaraan pendidikan formal dibiayai terutama dari anggaran daerah otonomi penyelenggara sekolah yang bersangkutan. Selain itu, pembiayaan dapat dilakukan melalui pemberdayaan peran serta masyarakat, orang tua siswa, dan sumber lainnya.

Selain dalam hal pembiayaan peran serta masyarakat dan orang tua siswa juga diikutsertakan dalam hal pengelolaan lembaga pendidikan, hal ini tercantum dalam

PP No 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional.

Peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- (1) Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan, dan pada semua jenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah;
- (2) Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan pengajaran, pembimbingan dan/atau pelatihan peserta didik;
- (3) Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar dan/atau penelitian dan pengembangan;
- (4) Pengadaan dan/atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah untuk menunjang pendidikan nasional;
- (5) Pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis;
- (6) Pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung, dan tanah untuk melaksanakan kegiatan belajarmengajar;
- (7) Pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;
- (8) Pemberian kesempatan untuk magang dan/atau latihan kerja;
- (9) Pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional;
- (10) Pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan/atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan;
- (11) Pemberian bantuan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan; dan

- (12) Keikutsertaan dalam program pendidikan dan/atau penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah di dalam dan/atau di luar negeri.

Berdasarkan berbagai aturan-aturan mengenai keterlibatan orang tua dan masyarakat. Pengelolaan pendidikan dapat diaplikasikan oleh sekolah melalui pengelolaan sekolah berdasarkan manajemen berbasis sekolah (MBS) karena menurut asidiq (2014:4-5), MBS menekankan keterlibatan secara penuh dan maksimal dari berbagai komponen-komponen seperti warga sekolah orang tua siswa dan masyarakat yang mendukung penuh akan tujuan pendidikan. Kesempatan untuk keterlibatan aktif tersebut dapat meningkatkan komitmen mereka terhadap sekolah, sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan pun dapat segera terwujud.

Menurut Hamzah (2013:154-155) program MBS bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keluwesan dan sumberdaya untuk meningkatkan mutu kinerja sekolah dan pendidikan terutama meningkatkan hasil belajar siswa. Program MBS dapat dikatakan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah sebagai stakeholders yang sangat berperan dalam pelaksanaan kebijakan MBS di suatu sekolah.

Selain otonomi yang luas, sekolah juga didukung oleh adanya partisipasi dari orangtua siswa dan masyarakat di sekitar sekolah dalam merealisasi program sekolah. Orangtua siswa dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan dana, tetapi bersama warga sekolah merumuskan dan mengembangkan program yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan sekolah. Partisipasi masyarakat dan orang tua siswa dapat juga berupa menyediakan diri untuk membantu sekolah sebagai narasumber atau organisator kegiatan sekolah yang dapat meningkatkan mutu hasil belajar siswa dan prestise sekolah secara keseluruhan.

Orangtua siswa dan masyarakat dapat juga terlibat secara aktif dalam proses kontrol kualitas pengelolaan sekolah.

Dengan adanya bantuan financial dari masyarakat dan orang tua siswa dalam pelaksanaan MBS akan membuat program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan mutu sekolah dan mutu peserta didik. Bantuan financial yang diberikan tersebut membuat pihak sekolah dapat melakukan pengembangan program yang telah ada yang sebelumnya sulit untuk dilaksanakan karena dana yang dibutuhkan hanya terbatas pada bagaimana oprasional sekolah dapat berjalan dan tidak dapat melakukan pengembangan program sekolah, hal ini dikarenakan dana yang diberikan masih terbatas dari APBD dan APBN.

Konsep tentang sekolah gratis yang selama ini didengungkan perlu dikaji ulang, selama pemerintah pusat dan daerah belum sepenuhnya dalam menerapkan kebijakan dan memenuhi kewajibannya untuk memberikan dana dan fasilitas secara merata dan berkeadilan kepada semua satuan pendidikan yang menyelenggarakan sekolah gratis. Selama kewajiban kepada sekolah gratis belum terlaksana, pelaksanaan MBS dapat menjadi pilihan alternatif.

Bantuan yang diberikan masyarakat dan orang tua siswa dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan pendidikan disekolah yang saat ini masih mengandalkan pemerintah, selain itu adanya peran serta masyarakat dan orang tua siswa dapat menumbuhkan tanggung jawab bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga tanggung jawab bersama masyarakat dan orang tua siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan disekolah

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan model manajemen yang memberikan otonomi dan fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah, mendorong partisipasi langsung warga sekolah baik guru, siswa, kepala sekolah dan karyawan,

masyarakat dan orang tua siswa dalam pengelolaan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan disekolah.

Partisipasi dari orangtua siswa dan masyarakat dalam program MBS berupa merealisasi program sekolah selain itu mendukung sekolah melalui bantuan dana dan bersama warga sekolah merumuskan dan mengembangkan program yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan disekolah. Partisipasi masyarakat dan orang tua siswa dapat membantu sekolah sebagai narasumber atau organisator kegiatan sekolah. Selain itu dapat juga terlibat secara aktif dalam proses kontrol kualitas pengelolaan sekolah.

Dengan adanya bantuan salah satunya financial dari masyarakat dan orang tua siswa dalam pelaksanaan MBS akan membuat program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan mutu sekolah dan mutu peserta didik. Bantuan financial yang diberikan tersebut dapat membuat pihak sekolah dapat melakukan pengembangan program yang telah ada yang sebelumnya sulit untuk dilaksanakan karena dana yang dibutuhkan hanya terbatas pada bagaimana oprasional sekolah dapat berjalan dan tidak dapat melakukan pengembangan program sekolah.

Bantuan yang diberikan masyarakat dan orang tua siswa dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan pendidikan disekolah, selain itu dapat menumbuhkan tanggung jawab bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga tanggung jawab bersama masyarakat dan orang tua siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan disekolah

### **Saran**

Persoalan pembiayaan pendidikan telah menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan partisipasi masyarakat dan orang tua siswa dalam pengelolaan pendidikan di sekolah dengan menerapkan konsep manajemen berbasis sekolah.

Peran masyarakat dan orang tua siswa dalam memajukan pendidikan memang telah dirumuskan dengan jelas dalam Undang-Undang. Namun dalam pelaksanaannya terus menghadapi kendala antara lain :

1. Pemerintah dan sekolah tidak dapat memberikan kewenangan kepada Komite Sekolah yang melaksanakan program MBS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka sinergi yang diharapkan tidak akan pernah terjadi.
2. Kurangnya sosialisasi, bimbingan, pelatihan dan pendampingan yang dilakukan pemerintah kepada sekolah tentang implementasi MBS dapat membuat program ini gagal.
3. Kebijakan BOS yang bertentangan dengan semangat MBS. Karena BOS merupakan kebijakan pemerintah dengan mensubsidi sekolah, sedangkan MBS membuat sekolah untuk hidup mandiri dengan bantuan masyarakat dan orang tua siswa.
4. Kesalahan persepsi di kalangan masyarakat akan pendidikan gratis dikarenakan slogan pemerintah dan partai politik melalui media bahwa pendidikan saat ini gratis dengan adanya BOS. Kesalahan persepsi inilah yang kemudian menyebabkan banyak masyarakat dan orang tua keberatan saat diajak berpartisipasi di sekolah terutama soal dana.

Kurangnya informasi soal MBS, kesalahan pemahaman soal pendidikan gratis, serta tidak terlatihnya pihak sekolah, secara akumulatif akan membuat program MBS menghadapi kendala saat diterapkan. Untuk bisa mensukseskan MBS, pemerintah, tokoh politik dan tokoh masyarakat harus secara serius melakukan langkah-langkah pemberian pemahaman agar masyarakat dan orang tua siswa menyadari bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama serta dapat berkontribusi aktif didalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Sofan S.Pd. 2013. *Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah*. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta.
- Assidiq, dkk.2014. *Implementasi MBS Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Sekolah*. Jurnal Administrasi Pendidikan, Vol 2, Nomor 1, April 2014.
- Budimansyah, Dasim. 2008. *Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat*. Jurnal Educationist vol. II No. 1 Januari 2008.
- Faturrahman, dkk. 2012. *Pengantar Pendidikan*. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta.
- Halim, Abdul, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2001
- Hamzah. 2013. *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah*. Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol. 10, No. 1, Juni 2013: 151-175.
- Kemendikbut. 2013. *Panduan Nasional MBS – S, Panduan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah, Di Sekolah Dasar*. Kemendikbut. Jakarta.
- Machwe, Prabhakar. 2000. *Kontribusi Hindu terhadap ilmu pengetahuan dan peradaban*. Widya Dharma. Denpasar.
- Muhammad, Syuaiban.2014. *Kepemimpinan dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. Jurnal Ilmiah WIDYA 56 Volume 2 Nomor 3 Agustus-Desember 2014.
- Priyono. *Pembiayaan Pendidikan Di Era Otonomi Daerah: Masalah Dan Prospek*. Di Unduh <http://akademika.or.id/arsip/Pembiayaan%20Pendidikan-Edy%20Priyono.pdf> tanggal 23 Maret 2016.
- Riduwan, Dr., M.B.A. 2013. *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Rohman, Arif. 2009. *Memahami Pendidikan & Ilmu Pendidikan*. LaksBang Mediatama. Yogyakarta.

- Suarni, Ertati. 2012. *Gerakan Quality Control Cycle (qcc) Sebagai Manajemen Partisipatif Strategi Perbaikan Mutu Berkelanjutan Pada Tingkat Fakultas di Universitas Muhammadiyah Palembang*. Jurnal Syifa'MEDIKA, Vol. 3 (No.1), September 2012.
- Sukmawati. 2011. *Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan melalui MBS*. Jurnal Cakrawala Kependidikan Vol 9, No 2, September 2011, 105-211.
- Susilawaty, dkk. 2012. *Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pengelolaan Pembiayaan Sekolah Di SD Negeri 4 Kota Banda Aceh*. Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 1, No. 2, November 2012
- Tilaar, H.A.R. 2003. *Kekuasaan dan Pendidikan. Indonesia Siantera*. Magelang.
- Tim Penyusun. 2003. *Pedoman Penjamin Mutu Perguruan Tinggi*. Direktorat Pendidikan Tinggi. Jakarta.